

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ilmu politik pada dasarnya merupakan disiplin pengetahuan yang menelaah dinamika kekuasaan, struktur kelembagaan, serta interaksi antara negara dan masyarakat dalam kerangka pengelolaan kehidupan bersama. Kajian ini tidak hanya membahas pada fenomena pemerintahan semata, melainkan juga pada proses produksi dan distribusi nilai-nilai yang mengikat dalam masyarakat. Melalui pendekatan multidimensional, ilmu politik berupaya memahami bagaimana norma, institusi, dan aktor berperan dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil maupun konflik yang menuntut resolusi. Seiring perkembangan zaman, ilmu politik semakin meluaskan fokus kajiannya dengan menyoroti keterkaitan antara pembangunan, demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dimensi ini muncul sebagai respons terhadap tantangan global yang tidak lagi hanya berpusat pada distribusi kekuasaan, melainkan juga pada bagaimana kekuasaan tersebut memengaruhi kualitas hidup manusia dan keberlangsungan ekosistem. Sehingga, ilmu politik berkontribusi dalam membangun kerangka kebijakan publik yang bersifat partisipatif, inklusif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial maupun ekologis.

Perkembangan ilmu politik tidak dapat dipisahkan dari isu-isu ekologis, sebab keberlanjutan alam merupakan prasyarat bagi terciptanya stabilitas sosial dan legitimasi politik. Keterhubungan antara aspek politik dan lingkungan menjadikan perlindungan alam bukan semata agenda moral, tetapi juga strategi rasional untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Sehingga perspektif politik perlu diintegrasikan dengan upaya pelestarian lingkungan sebagai salah satu fondasi keberlanjutan pembangunan di masa depan. Selain itu, pelestarian lingkungan pada hakikatnya dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menjaga, merawat, serta memulihkan keseimbangan ekosistem agar tetap mampu menopang kehidupan generasi sekarang dan mendatang. Konsep ini tidak hanya menekankan pada tindakan teknis, melainkan juga mencakup dimensi etis dan normatif yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungannya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pelestarian

lingkungan menjadi syarat fundamental untuk mencegah degradasi sumber daya alam yang dapat mengakibatkan krisis ekologis.

Oleh karena itu, pelestarian lingkungan juga menuntut kesadaran kolektif masyarakat mengenai keterbatasan daya dukung alam. Kesadaran ini harus terwujud dalam praktik pengelolaan sumber daya yang bijaksana, seperti pengendalian eksploitasi, pengurangan limbah, serta pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan. Di sinilah dibutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, peran lembaga masyarakat sipil, dan inisiatif komunitas lokal untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara idealitas konsep pelestarian dengan realitas implementasi di lapangan, di mana praktik pembangunan kerap mengabaikan daya dukung ekologis dan menempatkan aspek ekonomi sebagai prioritas utama.

Dengan hal ini, untuk kawasan pegunungan bentuk pelestarian lingkungan memiliki ciri tertentu karena wilayah tersebut merupakan hulu dari sistem tata air dan pusat keanekaragaman hayati. Perlindungan hutan, serta pengendalian alih fungsi lahan menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan fungsi ekologis pegunungan yang berperan sebagai penyangga kehidupan di dataran rendah melalui penyediaan air, udara bersih, dan kestabilan iklim mikro. Maka dari itu, pelestarian lingkungan di kawasan pegunungan juga perlu dikaitkan dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat setempat. Pola pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, serta diversifikasi ekonomi non-ekstraktif dapat menjadi solusi untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem pegunungan.

Bedasarkan hal tersebut, Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik geografis khas pegunungan. Dengan letaknya yang berada di bagian utara provinsi, berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja di sisi utara, Kabupaten Pinrang di sisi barat, Kabupaten Sidrap di selatan, serta Kabupaten Luwu di timur. Posisi strategis ini menempatkan Enrekang sebagai daerah penyangga yang menghubungkan kawasan dataran tinggi dengan daerah pesisir yang memiliki nilai strategis dalam konteks sosial-ekonomi maupun ekologi.

Dari sisi topografi, Enrekang memiliki bentang alam yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, yakni sekitar 84,96% wilayahnya, sedangkan hanya

sekitar 15,04% berupa dataran. Tinggi wilayahnya bervariasi dari 47 hingga 3.293 meter di atas permukaan laut, dengan iklim tropis dan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2.410 mm, serta suhu rata-rata sekitar 26,6 °C (Unismuh Makassar, 2020). Kondisi ini menjadikan Enrekang sebagai kawasan ekologis penting sekaligus penyangga tata air bagi wilayah sekitarnya. Keberadaan hutan pegunungan yang luas juga menyimpan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk flora dan fauna endemik yang menjadi penyangga ekosistem regional. Letak geografis yang mayoritas berupa pegunungan juga berdampak pada tantangan infrastruktur, termasuk aksesibilitas transportasi dan distribusi hasil produksi masyarakat. Dominasi sektor agraris menegaskan bahwa pembangunan daerah sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem pertanian dan hutan pegunungan.

Selain itu, Sektor pariwisata memiliki posisi strategis bagi Kabupaten Enrekang sebagai salah satu bidang usaha utama daerah. Penetapan pariwisata sebagai bisnis inti mendorong peningkatan perhatian pemerintah terhadap pengembangannya, sehingga pembangunan pariwisata menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Dalam konteks regional Sulawesi, potensi ini tercermin dari peran sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian wilayah telah menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan, sementara wilayah lain masih menjadikannya sebagai sumber pendapatan tambahan dengan kontribusi yang relatif kecil (Suhamdani dkk.,2010).

Di kabupaten Enrekang terdapat 32 daya tarik wisata, diantaranya terdapat jenis daya tarik wisata budaya, kuliner, panorama alam, kesenian dan ekowisata. Tetapi hanya ada 2 yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu Air Terjun Lewaja dan Villa Bambapuang. Wisata Alam Lewaja yang berdiri pada tahun 2000 memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat aktivitas sosial masyarakat Enrekang. Sebelum dikelola oleh pemerintah secara formal sebagai objek wisata, kawasan ini merupakan sumber mata air pegunungan yang digunakan warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan mengairi lahan pertanian. Kejernihan air serta suasana alam yang asri menjadikan Lewaja dikenal sebagai “kolam alami” yang melekat dalam keseharian masyarakat lokal. Transformasi dari ruang sosial tradisional

menjadi destinasi wisata menandai perubahan fungsi ekologis dan kultural kawasan tersebut.

Untuk kawasan wisata ini hanya berjarak sekitar 7 km dari pusat kota menjadikan Lewaja sebagai destinasi yang mudah diakses oleh masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah (Kaluppini Digital Desa, 2024). Keberadaan kawasan ini memperlihatkan bahwa ekosistem pegunungan Enrekang tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekologis, tetapi juga sebagai aset ekonomi berbasis jasa pariwisata. Perubahan signifikan mulai terlihat ketika pemerintah daerah menjadikan Lewaja sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata Enrekang. Infrastruktur mulai dibangun, seperti kolam pemandian permanen, jalan akses, dan fasilitas penunjang bagi wisatawan.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang sejatinya diatur dalam kerangka hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mewajibkan pemerintah daerah mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Kemudian tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2028.

Dalam PERDA No.8 tahun 2017 tersebut pemerintah diwajibkan melakukan pengawasan, pengendalian, serta pelestarian kawasan wisata, terutama yang berada di wilayah pegunungan. Dalam hal ini secara umum, kerangka pembangunan berkelanjutan tercermin dalam *Pasal 11 yang berbunyi "Arah kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yaitu mengembangkan konsep pengelolaan pariwisata Daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta melibatkan masyarakat sebagai stakeholder"*. Prinsip normatif yang diatur dalam Pasal 11 kemudian dipertegas dan diturunkan secara lebih spesifik dalam *Pasal 15 huruf d, yang berbunyi "pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya"*. Pasal 15 menjadi jembatan antara tujuan umum kebijakan dan strategi implementatif, di mana pembangunan pariwisata diarahkan agar tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesadaran regulatif bahwa potensi konflik antara pengembangan pariwisata dan daya dukung lingkungan perlu diantisipasi

sejak tahap perencanaan kebijakan. Yang kemudian pasal 15, dijabarkan secara lebih operasional dalam *Pasal 18 yang berbunyi " Strategi pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:*

- a. mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan kepariwisataan;*
- b. mengembangkan pariwisata dengan bertumpu dan memanfaatkan keunikan alam, budaya dan letak geografis, yang dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ekosistem;*
- c. mengembangkan pembangunan prasarana yang dapat menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan destinasi pariwisata secara berkelanjutan, terpadu lintas sektor; dan*
- d. menumbuhkembangkan kegiatan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan melalui peran Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat."*

Namun, berbagai ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi di lapangan, terutama pada kawasan Wisata Alam Lewaja yang mengalami kerusakan alam. Dengan menekankan pentingnya menjaga lingkungan, tata air, serta fungsi lahan di sekitar destinasi wisata, karena kawasan pegunungan Enrekang merupakan ruang hidup masyarakat sekaligus pusat pertanian. Sebagai kawasan yang sejak awal berfungsi sebagai sumber air dan lahan penyangga pertanian, Lewaja seharusnya mendapatkan prioritas dalam perlindungan keberlanjutan. Akan tetapi, pembangunan fasilitas wisata dalam dua dekade terakhir tidak dibarengi dengan analisis daya dukung lingkungan yang ketat sebagaimana diamanatkan dalam Perda tersebut. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kapasitas alam untuk menopang aktivitas tersebut.

Selain itu, tekanan lingkungan di kawasan wisata seperti Wisata Alam Lewaja telah memicu bencana alam yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Mengingat wilayah Enrekang didominasi oleh bentang pegunungan

hingga 84,96% (Unismuh Makassar, 2020), kerusakan alam berisiko mempercepat erosi, longsor, dan penurunan kualitas tata air.

NO.	Periode (Bulan– Tahun)	Jenis Bencana	Dampak/Informasi Tambahan
1.	Juni 2020	Longsor jalan, Banjir	Menutup akses jalan
2.	Oktober 2022	Luapan Sungai Lewaja	-
3.	Desember 2023	Longsor	Menutup akses jalan
4.	Mei 2024	Banjir dan longsor	Merendam 118 rumah; merusak lahan & ternak
5.	Agustus 2025	Banjir	-

Tabel 1. 1 : Data BNPB dalam lima tahun terakhir

Selain itu, degradasi lingkungan wisata juga berdampak pada sektor pertanian sebagai basis utama ekonomi Enrekang, yang menyerap lebih dari 55% tenaga kerja (BPS Enrekang, 2021). Pencemaran sumber air di kawasan pegunungan akan memengaruhi irigasi dan kualitas lahan pertanian, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas pangan masyarakat. Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara kelestarian kawasan wisata pegunungan dengan ketahanan pangan lokal. Dengan kata lain, kerusakan alam akibat pariwisata tidak hanya menggerus nilai ekonomi wisata, tetapi juga mengancam fondasi ekonomi utama masyarakat.

Kondisi ini menegaskan perlunya keterlibatan politik dalam tata kelola pariwisata. Politik lingkungan tidak hanya berbicara tentang regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan pelestarian ekosistem dengan pembangunan ekonomi. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, kebijakan pariwisata di daerah kerap lebih menekankan pada target peningkatan kunjungan wisatawan dibandingkan pengendalian dampak ekologis. Hal ini tercermin dari minimnya pengawasan fasilitas, kurangnya investasi pada infrastruktur ramah lingkungan, serta rendahnya partisipasi pemerintah dalam pengelolaan wisata Lewaja. Kegagalan dalam menghadirkan kebijakan wisata

berkelanjutan memperlihatkan lemahnya institusi politik lokal dalam mengelola isu lingkungan. Dalam perspektif ilmu politik, hal ini menunjukkan adanya gap antara *political will* dan *policy outcome*. Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim pariwisata sebagai sektor unggulan, tetapi di sisi lain, belum ada regulasi dan instrumen pelestarian yang konsisten ditegakkan. Akibatnya, kawasan wisata yang semestinya mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan justru menjadi sumber degradasi.

Berdasarkan uraian di atas maka muncul pertanyaan mengenai bagaimana keterkaitan antara pariwisata, kerusakan lingkungan, dan komitmen politik dalam pelestarian kawasan yang menjadi sangat penting untuk diteliti sejauh mana politik lokal mampu menghadirkan tata kelola yang berpihak pada masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan Perda Kabupaten Enrekang No. 8 Tahun 2017 dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan?
2. Bagaimana dampak kehadiran pariwisata pegunungan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar wisata alam Lewaja?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis sejauh mana komitmen politik pemerintah daerah Enrekang dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan berdasarkan regulasi kepariwisataan yang berlaku khususnya di kawasan wisata pegunungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kehadiran pariwisata pegunungan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar Wisata Alam Lewaja, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoretis

- Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam perspektif politik lingkungan dan tata kelola pariwisata berkelanjutan.
- Menambah literatur akademik mengenai hubungan antara komitmen politik lokal dan implementasi kebijakan pariwisata di daerah pegunungan.

b. Manfaat Praktis

- Menjadi masukan bagi pemerintah daerah Enrekang dalam merumuskan strategi pengelolaan wisata alam yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Memberikan rekomendasi nyata bagi pemerintah daerah Enrekang dalam menjalankan kebijakan pariwisata yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam pengembangan Wisata Alam Lewaja.
- Menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan di sektor pariwisata agar pengembangan destinasi wisata tidak hanya mengejar aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekologis.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu dibuat untuk membantu peneliti mendapatkan informasi tentang subjek yang akan dipelajari secara menyeluruh. Hasil dari beberapa peneliti yang dicantumkan dalam penelitian ini termasuk:

Pertama, (Freya Higgins-Desbiolles dan Raoul Bianchi 2024), dalam penelitian *Towards Understanding and Managing the Politics of Tourism in a Crisis-Challenged World* menganalisis politik pariwisata dengan menggunakan pendekatan konseptual dan interdisipliner. Teori yang dipakai menekankan pada politik, ekonomi politik, serta politik ekologi yang menjelaskan relasi kekuasaan dalam pariwisata global. Metode yang digunakan berupa analisis konseptual dari literatur dan fenomena empiris kontemporer. Hasil penelitian menekankan bahwa

politik pariwisata tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan global, neoliberalisme, dan krisis iklim. Dengan menggunakan pendekatan konseptual interdisipliner yang menggabungkan politik, ekonomi politik, dan politik ekologi, penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan arena perebutan kepentingan antara logika kapitalisme global dan tuntutan demokratisasi serta keadilan ekologis.

Kedua, Ida Syafriyani & Sugiana Desi Safitri (2025), Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumenep. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan pariwisata ke dalam strategi konkret yang melibatkan budaya lokal sebagai daya tarik utama wisata. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi lapangan dan wawancara kepada stakeholder pariwisata. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan hambatan dalam pengembangan destinasi wisata berbasis budaya.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep good governance yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan kearifan lokal dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah berhasil diimplementasikan melalui program event calendar tahunan yang mengintegrasikan festival budaya, promosi wisata, serta pemberdayaan UMKM lokal. Program tersebut meningkatkan identitas budaya sekaligus ekonomi masyarakat. Penelitian ini relevan untuk kajian implementasi kebijakan karena menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata daerah sangat bergantung pada sinergi stakeholder dan integrasi budaya lokal dalam kebijakan publik.

Ketiga, Arif Nugroho, Ihin Solihin, Jumanah1, Yuni Dwi Cahyani, Ikhdha Ratri Auladatsiyifa, Riyan Herdiana (2023), dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pasca Pandemic di Indonesia, penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Indonesia setelah pandemi Covid-19. Fokus penelitian adalah bagaimana pemerintah mengadaptasi kebijakan publik untuk memulihkan sektor pariwisata yang mengalami krisis.

Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis berbagai artikel ilmiah dan data sekunder terkait kebijakan pariwisata. Pendekatan ini digunakan untuk memahami tren implementasi kebijakan secara nasional.

Kerangka teori mengacu pada konsep implementasi kebijakan publik serta pembangunan berkelanjutan. Penelitian menekankan tiga aspek utama kebijakan yaitu sustenance, self-esteem, dan freedom from servitude dalam pengembangan pariwisata.

Hasil penelitian menunjukkan pemerintah menerapkan strategi new normal melalui protokol kesehatan, promosi wisata lokal, dan inovasi destinasi. Perubahan tren wisata menuju wisata alam dan domestik menjadi faktor penting pemulihan sektor. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bahwa fleksibilitas kebijakan dan adaptasi terhadap krisis merupakan faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata.

Keempat, (Fadlurrahman, Ari Mukti, Yuni Kurniasih & Rizza Arge Winanta 2022), dalam penelitian Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Di Desa Ngargono menggunakan teori governance khususnya collaborative governance metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun banyak stakeholder terlibat Disparpora, Universitas, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, belum ada kesatuan visi sehingga menimbulkan potensi gesekan antar pelaku wisata. Pendekatan yang dipakai adalah governance approach yang menekankan sinergi multi-aktor dalam pengembangan pariwisata.

Kelima, (Syahid Sirih, Hasyim, Nasruddin, dan Anwar 2024) penelitian ini menganalisis adaptasi kebijakan pengelolaan wisata di Pantai Dato untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Dengan memakai kerangka AGIL Parsons, penelitian menemukan bahwa meskipun kebijakan daerah sudah mengarah pada prinsip keberlanjutan, implementasinya masih lemah, terutama pada pengendalian daya dukung lingkungan, koordinasi antar-OPD, dan minimnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan wisata. Selain itu, aktivitas pembangunan fisik tertentu dinilai berpotensi merusak ekosistem pesisir. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi teknis,

koordinasi lintas sektor, pembentukan kelompok sadar wisata, serta peningkatan sosialisasi dan monitoring agar pengelolaan Pantai Dato lebih berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian di atas, kebaruan penelitian saya terletak pada integrasi antara analisis implementasi kebijakan, dimensi komitmen politik, dan isu keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka kajian yang kontekstual pada Kabupaten Enrekang. Penelitian ini tidak hanya melihat keberhasilan program atau kolaborasi aktor, tetapi menelaah apakah pemerintah daerah benar-benar memiliki dan menjalankan political will dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi pariwisata dan perlindungan ekologis. Dengan fokus tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam kajian politik kebijakan pariwisata berbasis lingkungan di tingkat pemerintah daerah dengan fokus analisisnya yang secara spesifik mengkaji komitmen politik Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan pariwisata pada kawasan Wisata Alam Lewaja.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori / Pendekatan	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1	Freya Higgins-Desbiolles & Raoul Bianchi (2024)	<i>Towards Understanding and Managing the Politics of Tourism in a Crisis-Challenged World</i>	Analisis konseptual berbasis literatur interdisipliner dan fenomena empiris kontemporer	Teori politik, ekonomi politik, dan politik ekologi	Menunjukkan bahwa politik pariwisata tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan global, logika neoliberalisme, dan krisis iklim. Pariwisata merupakan arena	Penelitian ini belum membahas dinamika politik pariwisata di tingkat lokal, khususnya bagaimana aktor pemerintah daerah dan masyarakat

					perebutan antara kepentingan kapitalisme global dan tuntutan keadilan ekologis.	menegosiasikan kekuasaan dalam konteks pembangunan wisata berkelanjutan
2	Ida Syafriyani & Sugiana Desi Safitri (2025)	Implementation of Tourism Development Governance Based on Local Wisdom	Kualitatif (observasi & wawancara mendalam + SWOT)	Good Governance & Local Wisdom-Based Tourism	Menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berbasis kearifan lokal melalui event calendar meningkatkan kunjungan wisata dan PAD daerah.	Penelitian ini belum menganalisis implementasi kebijakan secara sistematis menggunakan model implementasi (seperti Edward III) serta tidak mengkaji komitmen politik dan konflik antara pembangunan pariwisata dan

						pelestarian lingkungan dalam konteks birokrasi daerah.
3	Arif Nugroho, Ihin Solihin, Jumana h1, Yuni Dwi Cahyani, Ikhda Ratri Auladati syifa, Riyan Herdiana (2023)	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pasca Pandemi di Indonesia	Studi Literatur (Literature Review)	Implementasi Kebijakan Publik & Sustainable Tourism	Menjelaskan bahwa kebijakan baru normal menjadi strategi pemulihan sektor pariwisata melalui protokol kesehatan dan wisata domestik.	Penelitian ini bersifat makro dan berbasis studi literatur sehingga belum memberikan analisis empiris tentang bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan pariwisata di tingkat lokal, termasuk faktor politik, kapasitas birokrasi,

						dan kendala lapangan.
4	Fadlurrahman, Ari Mukti, Yuni Kurniasih & Rizza Arge Winanta (2022)	<i>Collaborative Governance dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargono</i>	Deskriptif kualitatif dengan teknik FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi	Teori <i>governance</i> , khususnya <i>collaborative governance</i>	Menemukan bahwa meskipun banyak aktor terlibat (Disparpora, universitas, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat), belum tercipta kesatuan visi sehingga menimbulkan potensi konflik antarpelaku wisata.	Kajian ini belum mengintegrasikan dimensi ekologi dan keadilan lingkungan dalam konsep kolaborasi, serta belum menelaah relasi kuasa dan wacana yang memengaruhi posisi aktor dalam proses tata kelola wisata.
5	Muhammad Syahid Sirih, Muhammad	Adaptasi Kebijakan Pengelolaan Wisata	Kualitatif, studi kasus; wawancara mendalam	Teori AGIL (Parsons): Adaptation, Goal Attainment,	Kebijakan sudah mengarah pada pariwisata berkelanjutan	Penelitian ini berfokus pada mengkaji kebijakan pariwisata

	Hasyim, Nasruddin & Amirul Ahsan Anwar (2024)	untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Dato	m, observasi, telaah dokumen	Integration, Latency	, namun implementasi teknis masih lemah. Terdapat kurangnya koordinasi antar-OPD, minimnya kelompok sadar wisata, dan belum adanya pengendalian daya dukung lingkungan.	berkelanjutan di Pantai Dato, tetapi fokusnya hanya pada satu lokasi dan pada aspek implementasi kebijakan, tanpa membahas lebih dalam bagaimana politik anggaran, dinamika elite lokal, konflik kepentingan, dan relasi kekuasaan mempengaruhi keberlanjutan destinasi tersebut.
--	---	--	------------------------------	----------------------	---	---

F. TINJAUAN PUSTAKA

1.6.1. TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial yang menjembatani antara perumusan kebijakan (policy formulation) dan dampak kebijakan (policy outcomes). Banyak kebijakan yang secara normatif dirancang dengan baik, namun gagal mencapai tujuan karena lemahnya implementasi. Oleh karena itu, para ilmuwan kebijakan menaruh perhatian besar pada fase implementasi sebagai proses politik dan administratif yang kompleks. Implementasi bukan sekadar pelaksanaan teknis, melainkan proses interaksi antara aktor, institusi, sumber daya, dan lingkungan kebijakan. Dalam konteks ini, George C. Edward III menjadi salah satu tokoh penting yang mengembangkan model analisis implementasi kebijakan yang sistematis dan operasional.

Secara umum, Edward III mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses yang terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan, yang melibatkan upaya untuk mencapai tujuan kebijakan melalui tindakan-tindakan administratif dan politik. Dalam karyanya *Implementing Public Policy* (1980), Edward menyatakan bahwa: *"Policy implementation is the stage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects"* (Edward III, 1980). Pernyataan ini menegaskan bahwa implementasi adalah fase transisi yang menentukan apakah kebijakan benar-benar berdampak pada masyarakat atau hanya berhenti sebagai dokumen normatif. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya.

Edward III berangkat dari asumsi bahwa kegagalan implementasi seringkali bukan disebabkan oleh buruknya tujuan kebijakan, melainkan oleh hambatan dalam proses pelaksanaan. Ia mengidentifikasi empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap pelaksana (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang menentukan efektivitas implementasi.

Variabel pertama adalah komunikasi. Menurut Edward III, kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada para pelaksana

agar dapat diimplementasikan dengan baik. Ia menyatakan: *“Orders to implement policies must be transmitted accurately, clearly, and consistently if they are to be effective”* (Edward III, 1980). Komunikasi yang tidak jelas akan menimbulkan distorsi pemahaman di tingkat pelaksana. Edward menekankan tiga aspek komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). Transmisi berkaitan dengan bagaimana pesan kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan ke pelaksana; kejelasan menyangkut sejauh mana isi kebijakan dipahami secara tepat; dan konsistensi berkaitan dengan stabilitas instruksi kebijakan dari waktu ke waktu. Dalam praktiknya, sering terjadi bahwa perintah kebijakan berubah-ubah atau tidak disampaikan secara lengkap, sehingga pelaksana di lapangan mengalami kebingungan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi.

Variabel kedua adalah sumber daya. Edward III menegaskan bahwa tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Ia menyatakan: *“No matter how clear and consistent implementation orders are, if the implementors lack the resources necessary to carry out policies, effective implementation will not occur”* (Edward III, 1980). Sumber daya yang dimaksud tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Ketersediaan staf yang kompeten, dana yang cukup, serta akses terhadap informasi yang relevan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, misalnya, kebijakan lingkungan yang progresif akan sulit terlaksana jika dinas terkait kekurangan anggaran atau tenaga ahli. Dengan demikian, sumber daya merupakan fondasi material dan administratif dalam proses implementasi.

Variabel ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Edward III menekankan pentingnya komitmen, integritas, dan persepsi pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Ia menyatakan bahwa: *“The dispositions or attitudes of implementors are critical to the success of policy implementation”* (Edward III, 1980). Meskipun komunikasi jelas dan sumber daya tersedia, implementasi dapat gagal jika pelaksana tidak memiliki kemauan atau komitmen untuk menjalankan kebijakan. Disposisi mencakup

tingkat penerimaan terhadap tujuan kebijakan, tingkat motivasi, serta orientasi nilai pelaksana. Dalam konteks politik, variabel ini sering berkaitan dengan political will dan loyalitas birokrasi. Jika pelaksana tidak sejalan dengan tujuan kebijakan atau memiliki kepentingan yang bertentangan, maka implementasi akan mengalami resistensi terselubung atau bahkan sabotase administratif.

Keempat variabel yang dikemukakan Edward III tersebut bersifat interdependen. Komunikasi yang baik tidak akan efektif tanpa sumber daya yang memadai; sumber daya yang cukup tidak menjamin keberhasilan tanpa disposisi yang mendukung; dan semua itu dapat terhambat oleh struktur birokrasi yang tidak efisien. Model Edward III memberikan kerangka analisis yang konkret dan aplikatif untuk menilai implementasi kebijakan di berbagai sektor, mulai dari kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Keunggulan model ini terletak pada kesederhanaan dan operasionalisasinya yang jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi.

Dalam kajian ilmu politik, implementasi kebijakan dipahami sebagai fase krusial dalam siklus kebijakan publik yang menjembatani antara keputusan politik dan realisasi tujuan kebijakan di masyarakat. Kebijakan publik bukan hanya hasil rasionalitas teknokratis, tetapi merupakan produk proses politik yang melibatkan distribusi kekuasaan, konflik kepentingan, negosiasi antaraktor, dan legitimasi institusional. Oleh karena itu, setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui proses politik baik melalui legislasi maupun keputusan eksekutif tantangan berikutnya adalah bagaimana keputusan tersebut dijalankan secara efektif oleh aparatur negara. Dalam konteks inilah teori implementasi George C. Edward III menjadi salah satu pendekatan klasik dan berpengaruh dalam studi kebijakan publik.

George C. Edward III dalam karyanya *Implementing Public Policy* (1980) menekankan bahwa implementasi merupakan tahap yang menentukan apakah kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar menghasilkan dampak yang diharapkan. Ia menyatakan bahwa implementasi adalah tahap di antara penetapan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi kelompok sasaran. Dengan kata lain, implementasi adalah proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan administratif. Dalam perspektif Ilmu Politik, proses

ini tidak netral, karena melibatkan interaksi antara aktor politik (pembuat kebijakan) dan aktor administratif (birokrasi), serta dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan kapasitas institusi negara.

Edward III mengembangkan model implementasi yang menekankan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini sering disebut sebagai model “top-down” karena berangkat dari asumsi bahwa kebijakan dirumuskan di tingkat atas dan kemudian dilaksanakan oleh aparat di tingkat bawah. Namun demikian, dalam Ilmu Politik, model ini tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif, melainkan juga sebagai cerminan relasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

1.6.2. TEORI EKOSENTRISME

Teori ekosentrisme (ecocentrism) merupakan salah satu paradigma etika lingkungan yang memandang bahwa pusat perhatian moral tidak hanya berpusat pada manusia, melainkan pada keseluruhan ekosistem yang mencakup makhluk hidup maupun unsur tak hidup. Paradigma ini lahir sebagai kritik terhadap dominasi antroposentrisme, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai dan tujuan alam semesta. Menurut pandangan ekosentris, seluruh komponen ekosistem memiliki nilai intrinsik, yakni nilai yang melekat pada dirinya sendiri terlepas dari manfaat atau kegunaan terhadap manusia. Pandangan ini diartikulasikan secara jelas oleh Aldo Leopold (1949) melalui konsep *land ethic* dalam karya monumentalnya *A Sand County Almanac*, di mana ia menyatakan bahwa manusia adalah bagian dari komunitas biotik, bukan penguasa atasnya. Dengan demikian, moralitas ekologis menuntut manusia untuk menghormati dan menjaga integritas, stabilitas, serta keindahan komunitas ekologis. Leopold menegaskan bahwa tindakan dianggap benar jika memperkuat sistem kehidupan, dan salah jika merusaknya. Pemikiran ini menjadi dasar dari gagasan ekosentrisme modern, yang menekankan keterkaitan mendalam antara manusia dengan alam sebagai satu kesatuan moral.

Secara konseptual, menurut Arne Naess teori ekosentrisme bekerja melalui beberapa mekanisme utama, yaitu:

1. Mekanisme nilai, yakni pergeseran dari nilai instrumental menuju nilai intrinsik. Dalam pandangan ini, ekosistem dan seluruh komponennya memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan mempertahankan eksistensinya tanpa harus diukur dari kegunaan bagi manusia.
2. Mekanisme interdependensi ekologis (*ecological interdependence*), di mana setiap makhluk hidup saling terhubung dalam sistem yang kompleks. Kerusakan pada satu komponen alam akan menimbulkan dampak luas terhadap keseluruhan ekosistem.
3. Mekanisme keseimbangan ekologis, yang menekankan bahwa keberlanjutan kehidupan di bumi hanya dapat dicapai melalui hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan.
4. Mekanisme kesadaran moral dan spiritual, yaitu pembentukan kesadaran etis bahwa manusia bukan pemilik alam, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang saling menopang.

Fritjof Capra (1996) melalui *The Web of Life* menegaskan bahwa kehidupan adalah jaringan sistem yang saling terkait, dan memahami keterkaitan itu merupakan langkah mendasar untuk membangun etika ekologis baru yang holistik. Dengan demikian, ekosentrisme tidak hanya mengubah cara pandang manusia terhadap lingkungan, tetapi juga menuntut perubahan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik agar berpihak pada keberlanjutan ekosistem.

Salah satu paling fundamental dari teori ekosentrisme adalah konsep Deep Ecology yang diperkenalkan oleh filsuf Norwegia Arne Naess pada tahun 1973. Arne Naess membedakan antara *shallow ecology* (ekologi dangkal) dan *deep ecology* (ekologi mendalam). *Shallow ecology* hanya berfokus pada pengendalian pencemaran dan pelestarian alam demi kepentingan manusia, sedangkan *deep ecology* menuntut perubahan mendasar dalam cara berpikir manusia tentang hubungan antara manusia dan alam. Arne Naess berbicara bahwa krisis ekologis global tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan teknokratis atau reformasi hukum, melainkan harus melalui perubahan paradigma ontologis dan etis tentang posisi manusia di dalam alam. Dalam prinsip *deep ecology*, terdapat gagasan *biospheric egalitarianism*, yakni

kesetaraan biosfer di mana semua entitas hidup manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme memiliki hak moral yang sama untuk hidup dan berkembang. Selain itu, Arne Naess memperkenalkan konsep *self-realization* dalam *deep ecology*, yakni perluasan diri manusia untuk menyadari keterhubungannya dengan seluruh makhluk hidup. Manusia baru dapat memahami eksistensinya secara utuh apabila ia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar.

Sementara itu dalam kerangka *deep ecology*, perubahan yang diharapkan bukan hanya bersifat kebijakan tetapi juga kultural dan spiritual. Gaya hidup manusia modern yang berorientasi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas dianggap sebagai sumber kerusakan ekologi. Karena itu, *deep ecology* mendorong terbentuknya gaya hidup yang lebih sederhana, ramah lingkungan, dan berakar pada kesadaran ekologis. Filsuf lingkungan Warwick Fox (1990) dalam *Toward a Transpersonal Ecology* menegaskan bahwa *deep ecology* tidak sekadar ajakan moral, melainkan upaya transformatif untuk memperluas kesadaran diri manusia menuju "*ecological self*", yakni diri yang menyatu dengan alam. Hal ini berarti bahwa tindakan melindungi alam bukan sekadar kewajiban moral eksternal, tetapi juga bagian dari ekspresi diri manusia yang autentik. Prinsip ini melahirkan gerakan lingkungan hidup yang lebih holistik, di mana pelestarian alam bukan hanya untuk keberlangsungan manusia, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan kehidupan secara menyeluruh.

Dalam ilmu sosial dan ilmu politik, Teori Ekosentrisme digunakan sebagai kerangka untuk melihat bagaimana kebijakan publik, orientasi politik, dan keputusan pemerintah dibangun berdasarkan etika ekologis yang menempatkan alam sebagai subjek moral. Ekosentrisme menekankan bahwa kebijakan politik tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau kepentingan manusia, tetapi juga harus mempertimbangkan integritas ekosistem sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Dalam konteks politik lingkungan, ekosentrisme membantu menjelaskan bagaimana negara atau pemerintah daerah seharusnya menyusun kebijakan yang menjaga keseimbangan ekologis, mendorong keberlanjutan, dan membatasi eksploitasi yang merusak landasan ekologis masyarakat.

Teori sangat relevan dan cocok digunakan dalam penelitian ini karna memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memetakan dan menganalisis

komitmen politik Pemerintah terhadap pelestarian lingkungan pada wisata pegunungan, dalam penelitian ini teori ekosentrisme menjadi alat analisis untuk menilai sejauh mana orientasi kebijakan pariwisata di Enrekang menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Sehingga komitmen politik yang bersifat ekosentris akan terlihat dari regulasi, program, dan prioritas pemerintah dalam menjaga kualitas tanah, air, vegetasi, serta membatasi aktivitas wisata yang berpotensi merusak. Dalam kerangka ekosentrisme, pemerintah daerah dituntut tidak hanya memanfaatkan lanskap pegunungan sebagai aset wisata, tetapi juga memastikan bahwa ekosistemnya tetap utuh sebagai “komunitas biotik” yang harus dilindungi.

Dengan memahami pola-pola ekosentrisme dalam komitmen politik bahwa kerusakan pada satu komponen lingkungan seperti kerusakan lahan, atau degradasi lingkungan pegunungan akan berdampak pada keseluruhan sistem ekologis, termasuk risiko bencana alam dan penurunan daya tarik wisata itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Enrekang yang berorientasi ekosentris harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis ke dalam perencanaan tata ruang, manajemen wisata, hingga pengawasan aktivitas masyarakat dan pelaku wisata. Dengan kata lain, komitmen politik yang sejati diukur dari tindakan preventif dan regulatif yang melindungi keberlanjutan ekosistem pegunungan secara jangka panjang.

1.6.3. KONSEP EKOLOGI POLITIK

Konsep ekologi politik (political ecology) merupakan salah satu kerangka konsep multidisipliner yang mempelajari keterkaitan antara kekuasaan politik, ekonomi, dan dinamika ekologi. Secara sederhana, konsep ini berupaya menjelaskan bagaimana keputusan politik dan struktur ekonomi memengaruhi hubungan manusia dengan lingkungan, serta bagaimana konflik lingkungan muncul sebagai akibat dari distribusi kekuasaan yang tidak merata. Istilah “ekologi politik” pertama kali diperkenalkan oleh Eric R. Wolf (1972) dalam tulisannya *Ownership and Political Ecology*, yang menekankan bahwa perubahan lingkungan tidak dapat dipahami semata-mata melalui analisis ekologi alamiah, melainkan juga melalui analisis politik dan ekonomi. Wolf berargumen bahwa permasalahan ekologis selalu memiliki akar politik, karena keputusan

yang memengaruhi lingkungan seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, atau kebijakan industri selalu terkait dengan siapa yang berkuasa, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan.

Eric R. Wolf (1972) juga menyoroti bagaimana relasi produksi dalam sistem kapitalisme memaksa masyarakat untuk mengeksploitasi lingkungan secara berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, tekanan pasar global membuat masyarakat tidak lagi mengelola sumber daya berdasarkan kebutuhan lokal, melainkan berdasarkan permintaan ekonomi yang dikendalikan oleh aktor-aktor kuat di luar komunitas. Misalnya, masyarakat yang sebelumnya memiliki sistem pertanian berkelanjutan dapat terdorong untuk membuka lahan besar-besaran demi komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di titik inilah Wolf melihat bahwa perubahan ekologis tidak terjadi secara alamiah atau teknis, melainkan sebagai konsekuensi dari dinamika kekuasaan yang mendorong eksploitasi sumber daya secara lebih intensif.

Dalam kerangka ini, ekologi politik menurut Wolf bukan hanya kajian tentang lingkungan, tetapi kajian tentang bagaimana kekuasaan mengatur relasi ekologis. Wolf menekankan bahwa setiap perubahan lingkungan harus dianalisis melalui pertanyaan: *siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan?* Ia mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, kelompok yang memiliki kuasa politik dan ekonomi akan memperoleh keuntungan lebih besar dari pemanfaatan sumber daya, sementara kelompok miskin atau masyarakat adat justru menanggung dampak ekologis seperti kerusakan tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya ruang hidup. Karena itu, ekologi politik menekankan aspek ketimpangan, baik dalam akses terhadap sumber daya maupun dalam distribusi risiko ekologis.

Eric R. Wolf (1972) mengingatkan bahwa kebijakan lingkungan sering kali dipolitisasi. Negara dapat mengklaim perlindungan lingkungan sebagai tujuan utama, tetapi di baliknya terdapat kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi pengaturan tata ruang. Dalam konsep ekologi politik Eric R. Wolf memiliki 4 aspek penting, Aspek pertama, Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam perspektif ekologi politik, Eric R. Wolf menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Pengelolaan lingkungan selalu

melibatkan aktor-aktor yang memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda, sehingga keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sering kali ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas politik atau ekonomi yang lebih kuat. Oleh karena itu, perubahan lingkungan sering kali merupakan hasil dari keputusan politik yang mencerminkan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Aspek kedua, Kepentingan Ekonomi dalam Pemanfaatan Lingkungan, ekologi politik juga menyoroti bahwa pemanfaatan lingkungan sering didorong oleh kepentingan ekonomi. Menurut Eric R. Wolf, sumber daya alam sering dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi atau keuntungan. Dorongan ekonomi ini dapat mempengaruhi cara manusia memanfaatkan lingkungan, terutama ketika aktivitas ekonomi mendorong eksploitasi sumber daya alam secara lebih intensif.

Aspek ketiga, Relasi Aktor dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Wolf juga menekankan pentingnya melihat interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Dalam ekologi politik, lingkungan menjadi arena interaksi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya alam. Hubungan antar aktor tersebut dapat berbentuk kerja sama, negosiasi, maupun konflik yang mempengaruhi bagaimana sumber daya alam dikelola dan dimanfaatkan. Aspek keempat, Dampak Sosial dan Ekologis dari Pemanfaatan Lingkungan, aspek terakhir dalam ekologi politik berkaitan dengan dampak yang muncul dari pemanfaatan sumber daya alam. Menurut Wolf, aktivitas manusia dalam memanfaatkan lingkungan tidak hanya mempengaruhi kondisi ekologis, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Perubahan lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap keseimbangan ekosistem sekaligus mempengaruhi kesejahteraan kelompok sosial yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Relevansi konsep ekologi politik dengan penelitian ini terletak pada pemahaman bagaimana pengembangan pariwisata berbasis alam seperti wisata pegunungan di Kabupaten Enrekang. Ketika kawasan wisata dikembangkan, pertanyaan yang diajukan Wolf menjadi sangat penting: siapa yang mengontrol ruang wisata? Apakah masyarakat lokal memperoleh akses dan manfaat secara adil? Bagaimana kebijakan daerah mengatur keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi? Perspektif Wolf membantu melihat

bahwa kebijakan pariwisata bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga ekspresi dari preferensi politik dan struktur kekuasaan. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang menilai komitmen politik Pemerintah Daerah Enrekang dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wisata Lewaja.

KERANGKA BERPIKIR

Pengembangan pariwisata di kawasan pegunungan Kabupaten Enrekang menimbulkan ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Berdasarkan teori Ekosentrisme, kebijakan seharusnya berorientasi pada perlindungan ekosistem sebagai subjek moral. Namun, fakta menunjukkan bahwa tekanan pariwisata terhadap lingkungan mulai dari degradasi sumber air, erositanah, hingga frekuensi bencana hidrometeorologi yang meningkat memperlihatkan lemahnya pengendalian pemerintah dalam menjaga integritas ekosistem Lewaja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip pelestarian yang tercantum dalam Perda No. 8 Tahun 2017 dan realitas implementasi di lapangan.

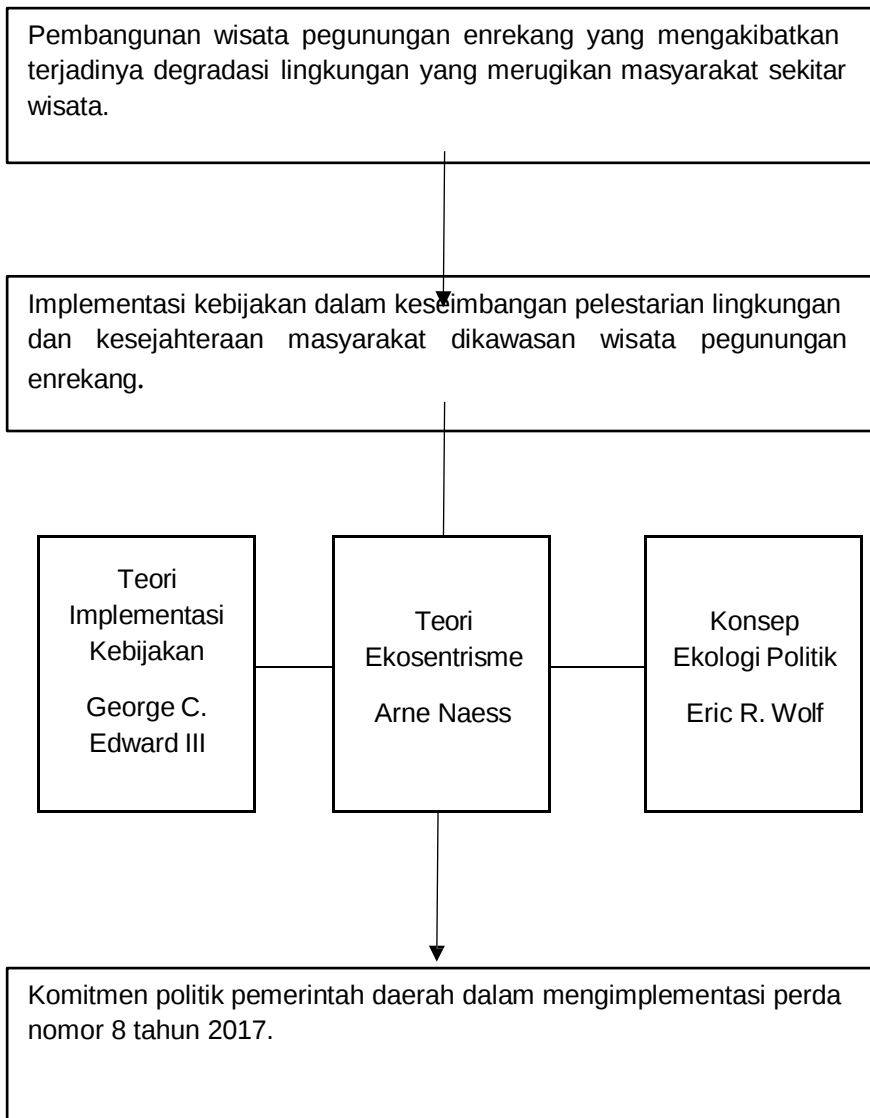
Konsep Ekologi Politik menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan selalu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan aktor-aktor politik lokal. Dalam konteks Enrekang, pemerintah daerah memposisikan pariwisata sebagai sektor unggulan, namun pada saat yang sama memiliki kewajiban menjaga daya dukung lingkungan. Relasi kepentingan antara pemerintah, pelaku wisata, serta masyarakat lokal menjadi faktor yang memengaruhi prioritas kebijakan. Dalam kerangka ini, komitmen politik tidak hanya diukur melalui pernyataan formal atau regulasi, tetapi melalui tindakan konkret seperti pengawasan, penegakan aturan, penataan tata ruang.

Kegagalan menjaga keseimbangan antara pembangunan wisata dan kelestarian ekologi tidak hanya menghasilkan kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga mengancam kesejahteraan masyarakat. Kerusakan sumber air pegunungan berpotensi menurunkan produktivitas pertanian yang menjadi sektor utama masyarakat Enrekang. Selain aspek ekonomi, ketidakteraturan pengelolaan wisata juga memicu risiko bencana yang membahayakan keselamatan warga.

Artinya, pelestarian lingkungan bukan hanya persoalan ekologi, tetapi juga persoalan politik kesejahteraan publik.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menilai sejauh mana komitmen politik Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Teori Ekosentrisme menjadi alat analisis untuk melihat apakah kebijakan pemerintah berpihak pada kelestarian ekosistem, sedangkan Ekologi Politik digunakan untuk menelaah bagaimana dinamika kekuasaan memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan menelusuri kebijakan, praktik lapangan, dan dampaknya terhadap masyarakat, penelitian ini akan mengungkap apakah pemerintah benar-benar mempraktikkan prinsip keberlanjutan atau justru lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek.

G. SKEMA BERFIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-strukturalis, karena bertujuan untuk memahami makna, wacana, dan relasi kekuasaan yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan wisata pegunungan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam bagaimana konsep “komitmen politik”, “pembangunan wisata”, dan “pelestarian lingkungan” dikonstruksi melalui praktik dan kebijakan lokal.

Metode kualitatif dipilih sebab fokus penelitian ini tidak terletak pada pengukuran angka atau statistik, melainkan pada pemahaman konteks sosial, politik, dan ekologis secara holistik. Pendekatan ini sejalan dengan teori ekosentrisme yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, serta teori ekologi politik yang menyoroti dinamika kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap makna di balik kebijakan dan tindakan politik pemerintah daerah Enrekang dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan wisata dan keberlanjutan lingkungan.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus khusus pada Kawasan Wisata Alam Lewaja yang terletak di Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu destinasi wisata pegunungan yang mengalami tekanan ekologis akibat peningkatan aktivitas pariwisata, sekaligus menjadi pusat kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata berbasis alam.

C. INFORMAN PENELITIAN

Informan dipilih secara purposive (berdasarkan kriteria inklusi) dan key person. Key person ini digunakan apabila peneliti telah memiliki informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga membutuhkan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang dianggap memahami persoalan

secara mendalam. Informan penelitian ini adalah individu yang memiliki informasi relevan mengenai kondisi lingkungan sekitar pariwisata. Informan dipilih dari berbagai latar belakang.

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala bidang pariwisata di Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	1
2.	Kepala bidang lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup	1
3.	Aktivis lingkungan	1
4.	Masyarakat Sekitar	3

Tabel 2. 1 : Informan Penelitian

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sebagai pemberi respons, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Data dijangkau dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

- **Data primer**, diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterlibatan dan pemahaman terhadap isu penelitian, seperti pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku wisata, serta warga sekitar kawasan Wisata Alam Lewaja. Data primer ini penting untuk memahami bagaimana aktor-aktor lokal memaknai komitmen politik dan pelestarian lingkungan dalam praktik nyata.
- **Data sekunder**, dikumpulkan melalui dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah daerah, data dari Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, berita media lokal, serta hasil penelitian terdahulu. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis empiris dan

membandingkan antara pernyataan aktor dengan realitas kebijakan yang berlaku.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga instrumen yang digunakan lebih bersifat fleksibel, dinamis, dan berpusat pada peneliti sebagai instrumen utama. Berikut adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan:

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan memiliki keleluasaan menyampaikan pandangannya. Pertanyaan disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi pandangan terhadap kebijakan wisata, bentuk komitmen pemerintah terhadap pelestarian lingkungan, serta dampak sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di kawasan Wisata Alam Lewaja untuk mengamati kondisi fisik lingkungan, aktivitas pariwisata, serta pola interaksi antara masyarakat, pengunjung, dan pemerintah daerah. Observasi ini bersifat non-partisipatif agar peneliti dapat mencatat gejala sosial dan ekologis secara objektif tanpa terlibat dalam kegiatan wisata.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, seperti peraturan daerah, laporan tahunan pemerintah, publikasi media, foto kegiatan, serta arsip kebijakan terkait pengelolaan wisata. Dokumentasi berfungsi untuk memverifikasi informasi hasil wawancara dan memperkaya analisis kontekstual penelitian.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif adalah proses menganalisis data kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik atau fenomena. Analisis

deskriptif kualitatif mencakup pengumpulan, pengecekan, dan penganalisisan data yang tidak dapat diukur dalam angka atau statistik.

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiono, 2017). Dengan ini kita dapat memilih laporan hasil wawancara yang lebih penting, jadi jika terdapat hasil laporan yang tidak penting maka bisa dihapuskan.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan setelah data yang diperoleh selesai direduksi, selanjutnya dilakukan proses penyajian data dengan menyajikan data untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340).

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari hubungan, pola, dan keteraturan pada untuk menggali makna dari data yang telah dikumpulkan. Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan tentang analisis dan interpretasi data yang dilakukan. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas (Salim & Syahrur, 2011: 16).